

2016



LAPORAN KINERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU





KWATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi tahun 2016, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan BPMPPPT Kota Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai dengan target Rencana kinerja yang telah ditetapkan BPMPPPT Kota Jambi Tahun 2013 - 2018.

Substansi Laporan Kinerja (LKJ) ini menginformasikan capaian kinerja badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi tahun 2016, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan kinerja BPMPPPT dan merupakan matarantai capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya laporan Kinerja (LKJ) tahun 2016, diharapkan BPMPPPT Kota Jambi dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami berharap agar laporan Kinerja (LKJ) tahun 2016 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja.

Jambi, Januari 2017

Pt. KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI



MUHTAR. SE

Pembina

NIP. 19661201 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Gambaran Umum BPPPT Kota Jambi	4
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3.2 Sumber Daya Manusia	6
1.3.3 Sarana dan Prasarana	9
1.3.4 Jenis-jenis Perizinan	11
1.4. Isu-isu Strategis Organisasi	14
1.5. Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi	17
2.1.1 Visi	17
2.1.2 Misi	18
2.1.3 Tujuan	18
2.1.4 Sasaran	20
2.1.5 Strategi	21
2.1.6 Kebijakan	23
2.2. Program dan Kegiatan	24
2.3. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi	29
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015	31



3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target RPJMD	33
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	33
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan	34
3.2. Akuntabilitas Keuangan	42
.....	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	46
4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	48





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai menurut Jenis Kelamin	8
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Kelompok Jabatan	8
Tabel 1.4	Data Pegawai Menurut Gol/Ruang	9
Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.1	Rencana Kerja	26
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi	29
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	31
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2016	33
Tabel 3.4	Dokumen Perizinan yang diterbitkan	39
Tabel 3.5	Tabel Realisasi Investasi	42
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Tak Langsung	42
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Langsung	43

BAB 9**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negara, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, keberhasilan, kegagalan dan perkembangan kinerja instansi pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan program-program kegiatannya maka disusunlah suatu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagaimana amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber



daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), yaitu

1. Mendorong Instansi Pemerintah melakukan Good Governance, karena pada LAKIP mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja instansi pemerintah.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam Laporan Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Laporan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

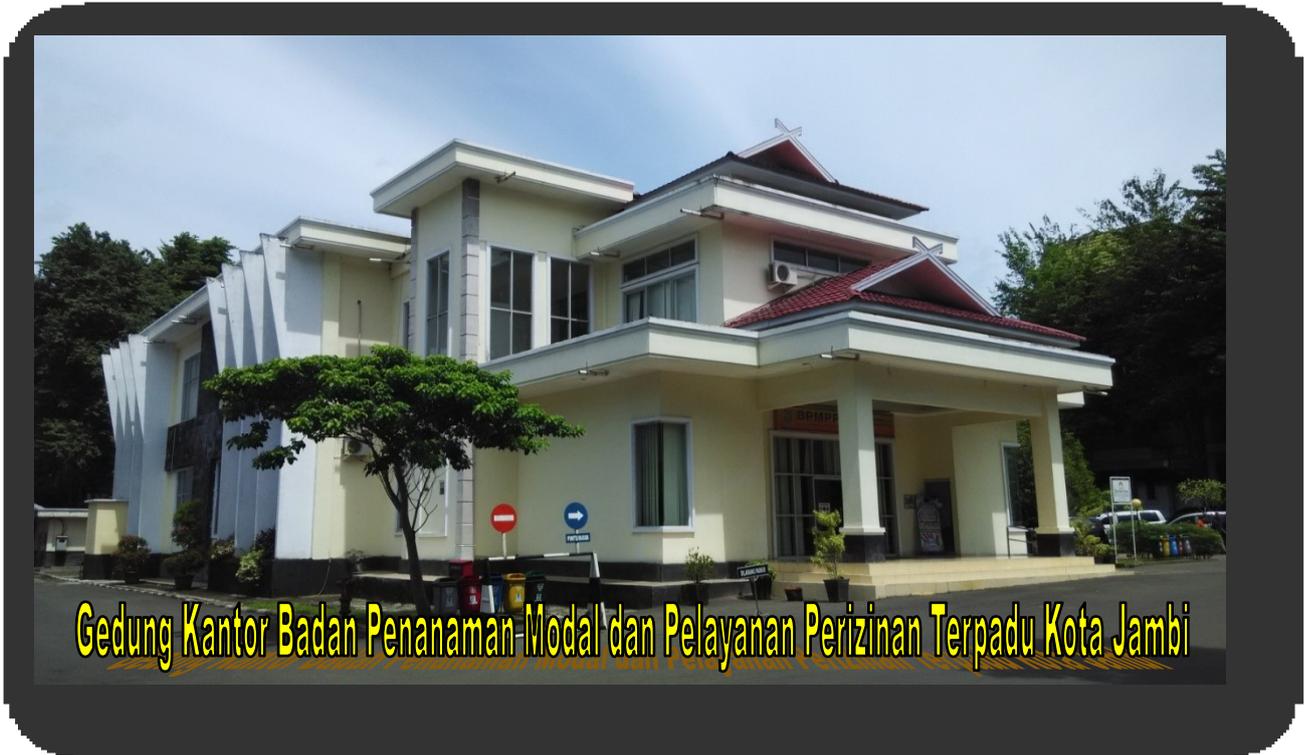


9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan,Sekretariat,Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta tata kerja pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan penandatanganan Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Jambi.

1.3. Gambaran Umum BPPPT Kota Jambi

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPPT) Kota Jambi merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang

pengyelenggaraan perijinan terpadu Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.



Satu Pintu (KPTSP) Kota Jambi, pengantian nama ini tidak saja berkaitan dengan status dan bidang yang harus dilayani akan tetapi menjadi perbaikan dan pengembangan lembaga dari bentuk kantor menjadi badan.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal.
4. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan dan non perizinan secara terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

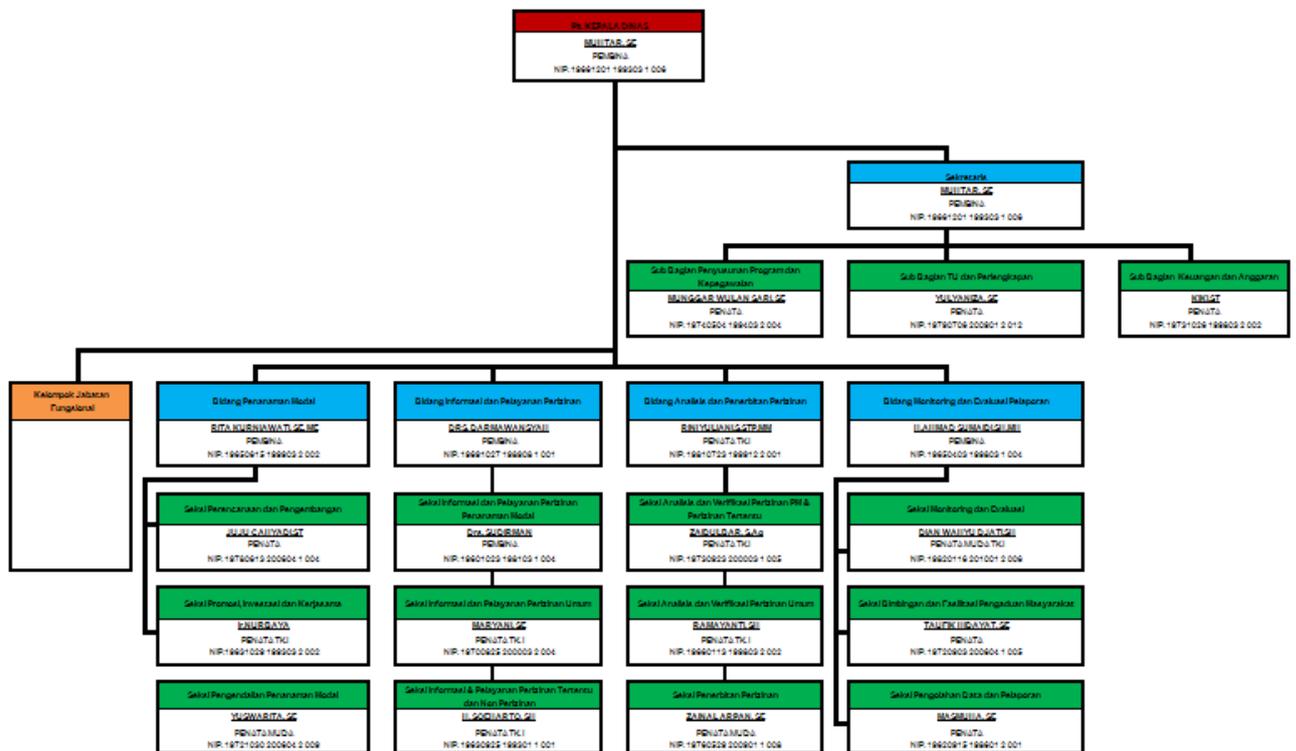
Berdasarkan Peraturan Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang Dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian



3. Bidang Penanaman Modal
 - a. Sub Bidang Penelitian, Pengkajian Dan Promosi Investasi
 - b. Sub Bidang Kerjasama, Pengendalian Dan Pengawasan
4. Bidang Informasi Dan Pelayanan Perizinan
5. Bidang Analisis Dan Penerbitan Perizinan
6. Bidang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
 - a. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi
 - b. Sub Bidang Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Tim Teknis

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi di bawah ini :



1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam lingkup Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dapat diklasifikasikan dalam table-tabel sebagai berikut : Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Desember 2016)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	11
2.	Perempuan	21
JUMLAH		32

Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2016)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	3
3.	Sarjana (S-1)	22
4.	Diploma III (D-3)	1
5.	SLTA	6
JUMLAH		32

Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Kelompok Jabatan (Desember 2016)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris badan	1

3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Seksi	7
5.	Staf Pelaksana	19
JUMLAH		32

Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Golongan/Ruang (Desember 2016)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
I.	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
2.	Pembina (IV/a)	4
3.	Penata Tingkat I (III/d)	5
4.	Penata (III/c)	7
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
6.	Penata Muda (III/a)	1
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
8.	Pengatur (II/c)	1
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4
10.	Pengatur Muda (II/a)	-
JUMLAH		32
II.	Non Pegawai Negeri Sipil	
	Tenaga Honorer	37
JUMLAH		37

1.3.3 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi sangat didukung

dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5 Data Sarana Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	11 Unit	
4	Komputer (Laptop)	16 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	31 Unit	
6	Komputer (Note Book)	2 Unit	
7	Printer	38 Unit	
8	Infocus	2 Unit	
9	Air Conditioning (AC)	7 Unit	
10	UPS	24 Unit	
11	Camera	5 Unit	
12	Scanner	1 Unit	
13	TV LCD	2 Unit	
14	Dispenser	6 Unit	
15	Kipas Angin	9 Unit	
16	Jam Dinding	6 Unit	
17	Handycam	1 Unit	
18	Telpon PHBX	9 Unit	
19	Mesin Penghancur Kertas	1 Unit	
20	Kulkas	1 Unit	
21	CCTV	2 Set	
22	Mesin Antri	1 Paket	
23	Harddisk Eksternal	3 Unit	
24	Filling Cabinet	13 Unit	
25	Lemari Arsip	27 Unit	
26	Lemari Arsip Besi	1 Unit	

27	Meja Rapat	1 Set	
28	Meja Kerja	8 Unit	
29	Meja 1 Biro	5 Unit	
30	Meja ½ Biro	51 Unit	
31	Meja Komputer	7 Unit	
32	Kursi tamu/Sofa	4 Set	
33	Kursi Putar Brother	19 Unit	
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit	
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit	
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit	
37	Kursi Rakuda	20 Unit	
38	Meteran	3 Unit	
39	Running Text LED	1 Unit	
40	Neonboxs	1 Unit	
41	SoundSystem	1 Unit	
42	Jaringan Internet	1 Paket	

1.3.4 Jenis – Jenis Perizinan di BPPPT Kota Jambi

Jenis penerbitan izin yang ada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPPT) Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi memiliki 42 (empat puluh dua) jumlah izin yang ada, akan tetapi izin yang pengurusannya dilakukan di BPPPT ada 34 (tiga puluh empat) jenis izin antara lain :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan;
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;



3. Retribusi gangguan;
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan;
6. Surat izin tempat usaha (SITU);
7. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
8. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
9. Izin penyelenggaraan reklame;
10. Izin jasa konstruksi (IUJK);
11. Izin pemborongan (SIP);
12. Izin usaha salon pangkas rambut, tata rias pengantin dan perawatan tubuh;
13. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
14. Izin usaha hotel, pondok wisata, rumah pondokan dan perkemahan;
15. Izin usaha restoran, rumah makan, kafe, kantin dan kedai makan/minum;
16. Izin praktek dokter, bidan, perawat, refraksionis, , fisioterafis, ahli radiologi, ahli gizi, pengobatan tradisional, apoteker dan asisten apoteker;
17. Izin usaha rumah sakit, apotek, toko obat, optikal, klinik, laboratorium, dan tukang gigi;
18. Izin pembuangan limbah cair;
19. Izin penggunaan peralatan kerja di perusahaan;
20. Izin penyelenggaraan pelatihan lembaga swasta;
21. Izin usaha bengkel, karoseri/bak muatan dan cucian umum kendaraan bermotor;
22. Izin usaha angkutan;



23. Izin berlayar;
24. Izin pendirian dan penggunaan gedung/kontainer bahan peledak di daerah operasi daratan;
25. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak gas;
26. Izin pendirian dan usaha depot lokal;
27. Izin mendirikan dan usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
28. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
29. Izin pangkalan minyak tanah;
30. Izin galian jalan
31. Izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum;
32. Tanda daftar industri (TDI)
33. Tanda daftar perusahaan (TDP)
34. Tanda daftar gudang (TDG)

Sedangkan beberapa izin yang dialihkan wewenang pengurusannya ke Provinsi adalah :

1. Izin juru bor;
2. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
3. Izin eksplorasi air bawah tanah;
4. Izin pengeboran air bawah tanah;
5. Izin pengambilan air bawah tanah;
6. Izin penurapan mata air;

7. Izin pengambilan mata air/sumur galian bersifat komersil;
8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

1.4. Isu – Isu Strategis Organisasi

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perijinan terpadu Kota Jambi, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kerana dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Perijinan dan Investasi dimasa datang. Isu strategis yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dalam mewujudkan pelayanan prima antara lain :

1. Sebagian besar perijinan yang dikeluarkan oleh BPMPT, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari SKPD lain, Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perijinan, terutama ketepatan waktu
2. Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang membidang perizinan

1.5. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Gambaran Umum SKPD
 - 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3.2 Sumber Daya Manusia
 - 1.3.3 Sarana dan Prasarana
 - 1.3.4 Jenis-jenis Perizinan di BPMPPT Kota Jambi
 - 1.4. Isu-isu Strategis Organisasi
 - 1.5. Sistematika Penyusunan
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1. Visi dan Misi
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi
 - 2.1.3 Tujuan
 - 2.1.4 Sasaran
 - 2.1.5 Strategi
 - 2.1.6 Kebijakan
 - 2.2. Program dan Kegiatan
 - 2.3. Penjanjian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
 - 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;



3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Lampiran-lampiran

BAB 99**PERENCANAAN KINERJA**

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana strategis BPPPT Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

2.1. Visi Dan Misi**2.1.1 Visi**

Visi menjadi bagian penting dalam melaksanakan Tupoksi karena akan mendorong organisasi termotivasi dalam mencapai tujuannya. Dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan kota, Visi BPPPT harus terkait dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Jambi yaitu "Terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya".

Karena keberadaan SKPD dalam hal ini BPPPT adalah untuk menopang pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kota yaitu pada misi mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih, dengan pertimbangan demikian, maka disusunlah visi dan misi BPPPT Kota Jambi sebagai bagian integral dari pemerintahan kota sebagaimana berikut :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA Mendukung Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa"

Visi demikian, dijabarkan dalam bentuk misi sebagai pengartikulasian sehingga sampai kepada tujuan dan sasaran BPPPT dari tahun 2013-2018.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka ada Misi yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM guna menciptakan Aparatur yang profesional;
2. Melakukan kajian Peluang dan Potensi Penanaman Modal;
3. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal;
5. Meningkatkan system informasi pelayanan perizinan penanaman modal;
6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

2.1.3 Tujuan

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPPT) Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan, tingkat efisiensi pelayanan perizinan, mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu, mengembangkan SDM aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.



2. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu serta mengembangkan SDM yang profesional, ramah dan jujur didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang terpadu dan nyaman yaitu tersedianya tempat pelayanan perizinan terpadu yang nyaman dan memadai, memungkinkan akan menarik calon investor atau masyarakat yang akan berinvestasi atau membuat perizinan di BPMPPT Kota Jambi.
4. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
5. Dengan adanya kajian peluang dan potensi penanaman modal diharapkan dapat memberikan usulan rumusan kebijakan penanaman modal kepada Walikota sehingga kebijakan yang diterapkan memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
6. Dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi investor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
7. Meningkatnya sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal.
8. Terciptanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

9. Dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan melalui bintek , magang dan sosialisasi.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal secara berkala.
3. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak akademisi guna memperoleh kajian yang mendalam tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi.
4. Merumuskan usulan kebijakan penanaman modal.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset milik Pemerintah Kota Jambi.
6. Menanamkan image kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Kota Jambi merupakan salah satu tujuan investasi di Provinsi Jambi.
7. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas BPMPPPT Kota Jambi.
8. Terciptanya etos kerja yang tinggi pada aparatur di BPMPPPT Kota Jambi.

9. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik.
10. Implementasi system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Kota Jambi.
11. Terwujudnya kegiatan penanaman modal yang memberikan multiplayer effect positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
12. Mengurangi miskomunikasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal.
13. Tersedianya data-data terkait penanaman modal dan perizinan di Kota Jambi.
14. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi

2.1.5 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kota jambi, maka strategi yang akan dilakukan BPMPPT sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengukuran kinerja pegawai dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan – pelatihan
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem dan mekanisme kerja.



3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan pengelolaan arsip secara benar.
4. Menyiapkan rancangan terkoneksi sistem IT BPPPT dengan berbagai rancangan IT khususnya di lingkungan Kota Jambi.
5. Meningkatkan daya tarik investasi Kota Jambi.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
7. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang terpercaya dan profesional.
8. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
9. Melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan tentang Pelayanan Perizinan terhadap masyarakat.
10. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh BPPPT Kota Jambi yang didukung oleh Tim Teknis.
11. Penyediaan data base yang siap setiap saat diperlukan.
12. Mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan.

2.1.6 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan BPPPT sebagai bagian daripada organisasi di Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penempatan karyawan di lingkungan internal BPPPT berdasarkan kesiapan dan kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi.
- b. Mengembangkan model internalisasi sikap siap melayani.
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan perizinan.
- f. Meningkatkan interkoneksi antar instansi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan.

Mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis IT yang terkoneksi dengan berbagai lembaga di lingkungan Kota Jambi khususnya dan dengan lembaga di lingkungan Provinsi umumnya.

2.2. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Jambi, Program dan kegiatan tahun 2016 dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
12. Perjalanan Dinas

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Meubeleur
 4. Pengadaan peralatan perkantoran
 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
 8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Program Perencanaan SKPD**
1. Penyusunan Rencana SKPD
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi.**
1. Pengembangan Data/Informasi
- 8. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik**
1. Verifikasi, Penerbitan dan Identifikasi Dokumen Perizinan
 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
 3. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
 4. Pengelola Data dan Penataaan Arsip Perizinan
- 9. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2. Sosialisasi Penanaman Modal
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya tarik investor dalam menenemkan modalnya di Kota Jambi	Tersedianya informasi peluang Usaha sektor/bidang unggulan di Kota Jambi.	1 Dokumen
		Terlaksana dan terpromosi Potensi Investasi beberapa Komoditi Unggulan Kota Jambi	2 Kali
		Terselenggaranya pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Penanaman modal di Kota Jambi	1 Dokumen
		Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	1 Dokumen
		LKPM dan Kerjasama yang difasilitasi	1 Dokumen
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan	Tercapainya pelayanan perizinan yang prima	100%



	kemudahan pengurusan perizinan	Tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan	100%
		Persentase kesesuaian data perizinan dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan	100%
		Tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan	100%
		Tersedianya blanko semua jenis perizinan	90%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Kinerja BPMPPT dengan angka IKM	Baik
		Terlaksananya monitoring perizinan	1 Dokumen
		Terlaksananya dan terfasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
		Jumlah Izin yang dimonitoring	300 Izin

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Jambi, berkewajiban membuat pelaporan yang *accountable* melalui penyajian Laporan Kinerja dengan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya pengukuran kinerja, maka akan dapat diambil sesuatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi

Adapun hasil pengukuran kinerja dengan Perbandingan Target dan Realisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tarik investor dalam menenemkan modalnya di Kota Jambi	Tersedianya informasi peluang Usaha sektor/bidang unggulan di Kota Jambi.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksana dan terpromosi Potensi Investasi beberapa Komoditi Unggulan Kota Jambi	2 Kali	3 Kali	150
		Terselenggaranya pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Penanaman modal di Kota Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		LKPM dan Kerjasama yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan pengurusan perizinan	Tercapainya pelayanan perizinan yang prima	100%	100%	100
		Tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan	100%	100%	100
		Persentase kesesuaian data perizinan dan ketepatan waktu penyelesaian perizinan	100%	90%	90
		Tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan	100%	100%	100
		Tersedianya blanko semua jenis perizinan	90%	90%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Kinerja BPMPT dengan angka IKM	Baik	Baik
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya monitoring perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksananya dan terfasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	100
		Jumlah Izin yang dimonitoring	300 Izin	330 Izin	110

Pagu anggaran yang merupakan urusan wajib Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi tahun 2016 adalah sebesar

Rp. 1.826.211.000,- yang meliputi 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Dan dana yang terserap adalah sebesar Rp. 1.701.696.100,-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi terdiri Sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Presentase (%), bahwa terealisasi dengan Sangat Baik dengan indikator kinerja yang target kinerjanya telah mencapai 103,57% dari 3 Sasaran.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Lalu Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2015		
			Target	Realisasi	(%)
	Terwujudnya peningkatan produktipitas UMKM, IKM dan aktifitas perekonomian	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 bidang setiap tahunnya dan terpromosinya potensi investasi beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	1 bidang & 2 Kegiatan	1 bidang & 2 Kegiatan	100
		Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi	50%	70%	70

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2015		
			Target	Realisasi	(%)
		Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan penanaman modal (RKPPMD) Kota Jambi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Terwujudnya system pelayanan perizinan penanaman modal yang berbasis IT	50%	0%	0
	Tercapainya Pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya monitoring perizinan dan terfasilitasinya pengaduan masyarakat serta terevaluasinya kinerja BPMPPT dengan angka IKM	2 Jenis Usaha, 90% & 70%	2 Jenis Usaha, 90% & 70%	110
		Tersedianya Data Base Perizinan serta tertatanya arsip perizinan	100% & 85%	100% & 82,63%	95
		Tercapainya Pelayanan Perizinan yang Prima	80%	91,33%	114,16
		Tersedianya data verifikasi dan identifikasi perizinan dan tersedianya blanko semua jenis perizinan	100%	99,68%	99,68

Pencapaian tahun 2016 mencapai 103,57% dan tahun 2015 mencapai 94,86% maka dapat disimpulkan Pencapaian Kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 8,72%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target RPJMD Tahun 2016

Tabel 3.3 Indikator Kerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan produktivitas UMKM, IKM dan aktifitas perekonomian	Realisasi Investasi	70%	255,9%	365,6
2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100

Pencapaian Kinerja tahun 2016 mencapai 103,57% dan terdapat realisasi nilai investasi di tahun 2016 yang melebihi target yang terdapat di RPJMD Kota Jambi sebesar 232,80% hal ini disebabkan kondisi yang kondusif berinvestasi di Kota Jambi yang berdampak pada semakin banyaknya pengusaha yang menanamkan investasi di Kota Jambi.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Peningkatan Persentase pelaksanaan sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
- Meningkatkan Koordinasi antar lembaga yang berhubungan langsung dengan proses perizinan

- Peningkatan sarana prasarana dalam proses pengurusan perizinan dengan diluncurkan sistem informasi perizinan online yang secara langsung diresmikan oleh Walikota Jambi

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan kursus yang berkenaan pemberian pelayanan perizinan

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Kota Jambi tahun 2016 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

dengan Pagu Dana Rp. 13.146.000,- Realisasi Rp. 12.021.000,-

Realisasi Keuangan 91,44 % dan Realisasi Fisik 100 %

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

dengan Pagu Dana Rp. 245.124.000,- Realisasi Rp. 201.697.748,-

Realisasi Keuangan 82,28 % dan Realisasi Fisik 100 %



3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
dengan Pagu Dana Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp. 5.665.000,-
Realisasi Keuangan 28,33 % dan Realisasi Fisik 99,99 %
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
dengan Pagu Dana Rp. 265.291.500,- Realisasi Rp. 256.008.500,-
Realisasi Keuangan 96,50 % dan Realisasi Fisik 100 %
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
dengan Pagu Dana Rp. 110.652.450,- Realisasi Rp. 110.652.450,-
Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %
6. Penyediaan alat tulis kantor
dengan Pagu Dana Rp. 59.633.500,- Realisasi Rp. 59.441.500,-
Realisasi Keuangan 99,68 % dan Realisasi Fisik 100 %
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
dengan Pagu Dana Rp. 46.095.000,- Realisasi Rp. 46.095.000,-
Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dengan Pagu Dana Rp. 15.000.500,- Realisasi Rp. 14.999.400,-
Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dengan Pagu Dana Rp. 18.800.000,- Realisasi Rp. 18.610.000,-
Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %

10. Penyediaan makanan dan minuman

dengan Pagu Dana Rp. 34.694.000,- Realisasi Rp. 21.137.000,-

Realisasi Keuangan 60,92 % dan Realisasi Fisik 85,29 %

11. Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

dengan Pagu Dana Rp. 148.198.500,- Realisasi Rp. 148.198.500,-

Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %

12. Perjalanan Dinas

dengan Pagu Dana Rp. 250.700.000,- Realisasi Rp. 247.065.405

Realisasi Keuangan 98,55 % dan Realisasi Fisik 98,55 %

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional

dengan Pagu Dana Rp. 307.289.050,- Realisasi Rp. 306.000.000,-

Realisasi Keuangan 99,58 % dan Realisasi Fisik 100 %

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

dengan Pagu Dana Rp. 98.500.000,- Realisasi Rp. 96.400.000,-

Realisasi Keuangan 97,87 % dan Realisasi Fisik 100 %

3. Pengadaan Mebeler

dengan Pagu Dana Rp. 93.090.000,- Realisasi Rp. 92.640.000,-

Realisasi Keuangan 99,52 % dan Realisasi Fisik 100 %

4. Pengadaan peralatan perkantoran
dengan Pagu Dana Rp. 31.280.000,- Realisasi Rp. 30.950.000,-
Realisasi Keuangan 98,95 % dan Realisasi Fisik 100 %
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan Pagu Dana Rp. 152.600.000,- Realisasi Rp. 118.551.030,-
Realisasi Keuangan 77,69 % dan Realisasi Fisik 100 %
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
dengan Pagu Dana Rp. 33.000.000,- Realisasi Rp. 33.000.000,-
Realisasi Keuangan 100 % dan Realisasi Fisik 100 %
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
dengan Pagu Dana Rp. 27.500.000,- Realisasi Rp. 26.535.000,-
Realisasi Keuangan 96,49 % dan Realisasi Fisik 100 %
8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
dengan Pagu Dana Rp. 45.000.000,- Realisasi Rp. 44.525.000,-
Realisasi Keuangan 98,94 % dan Realisasi Fisik 100 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
dengan Pagu Dana Rp. 108.000.000,- Realisasi Rp. 100.730.000,-
Realisasi Keuangan 93,27 % dan Realisasi Fisik 100 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan Pagu Dana Rp. 56.000.000,- Realisasi Rp. 39.750.000,- Realisasi Keuangan 70,98 % dan Realisasi Fisik 99 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan Pagu Dana Rp. 7.456.000,- Realisasi Rp. 6.006.000,- Realisasi Keuangan 80,55 % dan Realisasi Fisik 100 %

6. Program Perencanaan SKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana SKPD dengan Pagu Dana Rp. 8.989.000,- Realisasi Rp. 8.264.000,- Realisasi Keuangan 91,93 % dan Realisasi Fisik 100 %

7. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Data/Informasi dengan Pagu Dana Rp. 427.000.000,- Realisasi Rp. 402.360.000,- Realisasi Keuangan 94,23 % dan Realisasi Fisik 97 %

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan
dengan Pagu Dana Rp. 458.875.000,- Realisasi Rp. 420.671.600,-
Realisasi Keuangan 91,67 % dan Realisasi Fisik 99 %
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
dengan Pagu Dana Rp. 221.325.000,- Realisasi Rp. 219.025.000,-
Realisasi Keuangan 98,96 % dan Realisasi Fisik 100 %
3. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan Pelayanan Perizinan
dengan Pagu Dana Rp. 222.407.000,- Realisasi Rp. 209.019.000,-
Realisasi Keuangan 93,98 % dan Realisasi Fisik 100 %
4. Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan
dengan Pagu Dana Rp. 68.791.000,- Realisasi Rp. 65.391.000,-
Realisasi Keuangan 95,06 % dan Realisasi Fisik 100 %

Dalam Tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi telah menerbitkan dokumen-dokumen perizinan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun 2016

No	Jenis-jenis Dokumen Perizinan	Jumlah
1	HO	2.704 dokumen
2	SITU	2.637 dokumen
3	SIUP Besar	41 dokumen
4	SIUP Menengah	346 dokumen
5	SIUP Kecil	2.004 dokumen
6	SIUP Mikro	236 dokumen
7	SIUP Minuman Beralkohol	11 dokumen



No	Jenis-jenis Dokumen Perizinan	Jumlah
8	TDP	2.861 dokumen
9	TDI	44 dokumen
10	TDG	37 dokumen
11	IUI	0 dokumen
12	IUJK	355 dokumen
13	Salon	2 Dokumen
14	Restoran	17 Dokumen
15	Hiburan Umum	9 Dokumen
16	Apotek	17 Dokumen
17	Angkutan	4 Dokumen
18	PAUD	112 Dokumen
19	Bengkel	8 Dokumen
20	Hotel	12 Dokumen
21	RTGL	1.125 Dokumen
22	RTGL Perumahan	1.615 Dokumen
23	Ruko dan bangunan Lainnya	787 Dokumen
24	Ruko Sementara	0 Dokumen
25	Tower	4 Dokumen
26	IMBR	673 Dokumen
27	Prinsip	11 Dokumen

Dalam satu tahun Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi telah menerbitkan dokumen perizinan sebanyak 11.265 dokumen untuk Izin Usaha Baru. Adapun data rekap Jumlah Izin Registrasi/Daftar Ulang selama tahun 2016 sebanyak 14.543 dokumen

9. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Dengan pagu dana Rp. 277.538.000,- Realisasi Rp. 253.232.500,-

Realisasi keuangan Rp. 91,24 % dan Realisasi Fisik 100 %

2. Sosialisasi Penanaman Modal

dengan Pagu Dana Rp. 61.250.000,- Realisasi Rp. 54.097.000,-
Realisasi Keuangan 88,32 % dan Realisasi Fisik 100 %

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan Pagu Rp. 81.025.000,- Realisasi Rp. 77.900.000,-
Realisasi Keuangan Rp. 96,14 % dan Realisasi Fisik 100 %

4. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dengan pagu Dana Rp. 8.000.000,- Realisasi 0%.

Realisasi Keuangan Rp. 0 % dan Realisasi Fisik 0 %

Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal yang berdampak pada belum optimalnya penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Pada tahun 2016 terrealisasi investasi penanaman modal di Kota Jambi sebesar 2.104.401.841.760 dan mengalami peningkatan setiap tahun, sebagaimana pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.5 Tabel Realisasi Investasi

No	Tahun	Realisasi PMDN	PMA	Jumlah
1	2014	391.573.244.050	-	391.573.244.050
2	2015	461.128.744.601	130.100.300.000	591.229.044.601
3	2016	2.104.401.841.760	-	2.104.401.841.760

Secara umum pencapaian/realisasi fisik program dan kegiatan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi mencapai 91,02 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2016.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kota Jambi Tahun 2016, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	2.761.067.938	2.305.869.572	83,51
	JUMLAH	2.761.067.938	2.305.869.572	83,51

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.227.335.450	1.141.591.503	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	13.146.000	12.021.000	91,44
2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	245.124.000	201.697.748	82,28
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	5.665.000	28,33
4	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	265.291.500	256.008.500	96,50
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.652.450	110.652.450	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	59.633.500	59.441.500	99,68
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	46.095.000	46.095.000	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.500	14.999.400	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.800.000	18.610.000	100
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	34.694.000	21.137.000	60,92
11	Penyediaan jasa pengman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	148.198.500	148.198.500	100
12	Perjalanan Dinas	250.700.000	247.065.405	98,55
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	788.259.050	748.601.030	
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	307.289.050	306.000.000	99,58
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	98.500.000	96.400.000	97,87
3	Pengadaan Mebeleur	93.090.000	92.640.000	99,52
4	Pengadaan peralatan perkantoran	31.280.000	30.950.000	98,95
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.600.000	118.551.030	77,69
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	33.000.000	33.000.000	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	27.500.000	26.535.000	96,49
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000	44.525.000	98,94

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Penyerapan (Rp.)	%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	108.000.000	100.730.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	108.000.000	100.730.000	93,27
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	56.000.000	39.750.000	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	56.000.000	39.750.000	70,98
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.456.000	6.006.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.456.000	6.006.000	80,55
VI	Program Perencanaan SKPD	8.989.000	8.264.000	
1	Penyusunan rencana SKPD	8.989.000	8.264.000	91,93
VII	Program Pengembangan Data/Informasi	427.000.000	402.360.000	34,09
1	Pengembangan Data/Informasi	427.000.000	402.360.000	94,23
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	971.398.000	914.106.600	89,93
1	Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan	458.875.000	420.671.600	91,67
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	221.325.000	219.025.000	98,96
3	Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	222.407.000	209.019.000	93,98
4	Pengelola Data dan penataan arsip perizinan	68.791.000	65.391.000	95,06
IX	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	427.813.000	385.229.500	
1	Pengembangan potensi unggulan Daerah	277.538.000	253.232.500	91,24
2	Sosialisasi Penanaman Modal	61.250.000	54.097.000	88,32
3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	81.025.000	77.900.000	96,14
4	Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	8.000.000	0	0



Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 83,51 % atau sebesar Rp. 2.305.869.572,- dari dana ditetapkan Rp. 2.761.067.938,-, sedangkan belanja langsung capaian realisasi keuangan 93,15 % atau sebesar Rp. 3.746.638.633,- dari dana ditetapkan Rp. 4.022.250.000,- yang pelaksanaan 9 program dan 33 kegiatan dengan total anggaran terlaksana tahun 2016 sebesar Rp. 6.052.508.205,- atau 89,23 % dari anggaran Rp. 6.783.317.938,-.

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dengan memperhatikan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "BAIK".

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN tahun 2016 melalui Izin Prinsip Penanaman Modal yang terbit sebanyak 11 (sebelas) izin prinsip dengan Total realisasi investasi adalah sebesar Rp. 320.035.500.000,-.
2. Tahun 2016, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi telah menerbitkan dokumen perizinan sebanyak 11.265 dokumen untuk Izin Usaha Baru. Adapun data rekap Jumlah Izin Registrasi/Daftar Ulang selama tahun 2016 sebanyak 14.543 dokumen.
3. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dengan Analisa data dari hasil survei melalui questioner kepada 367 pengguna layanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap 9 unsur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur yang akhirnya

akan menghasilkan pelayanan prima good governance dan clean governance. Hasil pengolahan data sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	BOBOT RATA-RATA UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS	NILAI IKM
1	2	3	4	5=4x0,0071	6=5x25
U1	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	1006	3,048	0,338	8,45
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1003	3,039	0,337	8,43
U3	Kecepatan Waktu Merespon Tamu mendapat Pelayanan	970	2,939	0,326	8,15
U4	Kemungkinan adanya Pungutan Lain Selain Tarif	1259	3,827	0,425	10,63
U5	Kesesuaian produk jenis layanan	1026	3,109	0,345	8,63
U6	Kopetensi/ kemampuan Petugas Pelayanan	1009	3,058	0,339	8,48
U7	Sikap dan prilaku petugas Pelayanan	1031	3,124	0,347	8,68
U8	Tersedianya Maklumat pelayanan	157	3,517	0,390	9,75
U9	Penanganan Pengaduan pengguna layanan	1167	3,558	0,395	9,88

Berdasarkan analisa data diatas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,243. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai IKM setelah dikonversi adalah sebesar 81,08 dengan mutu pelayanan pada katagori "B". Ini berarti kinerja unit pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi berkatagori B sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Kesimpulan dan Analisis IKM Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Tahun 2016

No	Indikator	Kesimpulan
1	2	3
1	IKM setelah dikonversi	81,01
2	Mutu Pelayanan	B
3	Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dalam kondisi BAIK,

4. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplayereffect positif bagi perekonomian daerah.
5. Dan di penghujung tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi telah membuat terobosan baru yang merupakan era baru proses perizinan di Kota Jambi yang bertujuan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam pengurusan perizinan, yaitu Sistem Pelayanan Perizinan Online yang diresmikan oleh Walikota Jambi

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPMPPT Kota Jambi di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan
2. Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Agar Pelaksanaan tugas dan fungsi BPMPPT tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sarana dan prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.



Gambar 1. Walikota Jambi Bapak SY. Fasha, ME membuka secara resmi penggunaan E-Launching Sistem Informasi Perizinan Online



Gambar 2. Tampilan yang muncul pada aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online